

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 7 April 2021



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

Resume Berita

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1.	mitrapol.com	Rabu, 7 April 2021	Bangun Jalan Tol Semarang-Demak, Kementerian PUPR Tetap Lindungi Kawasan Mangrove Pesisir Pantai Utara Jawa	Dalam membangun infrastruktur, Kementerian PUPR tidak hanya bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, namun juga memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan. Pembangunan tol Semarang-Demak didahului dengan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan pemerintah daerah terutama terkait dengan trial timbunan tanggul laut. Juga dilakukan program relokasi lahan mangrove yang berada di sekitar pembangunan seksi 1. https://mitrapol.com/2021/04/06/bangun-jalan-tol-semarang-demak-kementerian-pupr-tetap-lindungi-kawasan-mangrove-pesisir-pantai-utara-jawa-2/
2.	surabaya.tribunnews.com	Rabu, 7 April 2021	Kementerian PUPR Selesaikan Pengembangan Sistem Sanitary Landfill TPA Sampah di Jabon Sidoarjo	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan revitalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Jabon di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Revitalisasi TPA Sampah Jabon dilakukan dengan mengembangkan sistem, dari semula menggunakan sistem penimbunan sampah terbuka (open dumping), dengan tujuan untuk meminimalisir dampak pencemaran, baik air, tanah, maupun udara, sehingga akan lebih ramah lingkungan https://surabaya.tribunnews.com/2021/04/06/kementerian-pupr-selesaikan-pengembangan-sistem-sanitary-landfill-tpa-sampah-di-jabon-sidoarjo
3.	monitor.co.id	Rabu, 7 April 2021	Menko Luhut Dorong Kolaborasi Food Estate Libatkan Kementan, PUPR dan Peneliti	Menko Luhut secara tegas mengatakan kawasan Food Estate Kalteng berfokus di wilayah pengembangan lahan gambut sehingga sinergi peran Kementerian Pertanian (Kementan), PUPR, dan Kementerian Desa menjadi sangat penting. https://monitor.co.id/2021/04/06/menko-luhut-dorong-kolaborasi-food-estate-libatkan-kementan-pupr-dan-peneliti/

4.	mitrapol.com	Rabu, 7 April 2021	Kementerian PUPR LAKukan Sejumlah Langkah TAnggap Darurat Bencana Banjir NTT dan NTB	Kementerian PUPR berupaya melaksanakan perintah presiden untuk menangani darurat bencana, dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia, alat berat dan personil yang berada di kantor-kantor balai di NTB-NTT. https://mitrapol.com/2021/04/06/kementerian-pupr-lakukan-sejumlah-langkah-tanggap-darurat-bencana-banjir-ntt-dan-ntb/
5.	borneo24.com	Rabu, 7 April 2021	Bangun Tol Berbasis Lingkungan, Ini Kata Kementerian PUPR	Dalam upaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dari pembangunan Tol Semarang – Demak, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Daerah menyiapkan program relokasi lahan mangrove yang berada di sekitar pembangunan Seksi 1 Tol Semarang – Demak ruas Semarang – Sayung. https://borneo24.com/nasional/bangun-tol-berbasis-lingkungan-ini-kata-kementerian-pupr
6.	investor.id	Rabu, 7 April 2021	PUPR Gandeng PLN Integrasikan Layanan Listrik bagi Rumah MBR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama dengan Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) terkait dengan integrasi data pengguna layanan listrik debitur/nasabah penerima manfaat dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Melalui Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Arief Sabaruddin menandatangani perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama dengan Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) terkait dengan integrasi data pengguna layanan listrik debitur/nasabah penerima manfaat dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) disaksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN, Erick Thohir di Gedung Kementerian BUMN. https://investor.id/business/pupr-gandeng-pln-integrasikan-layanan-listrik-bagi-rumah-mbr

7.	Koran Tempo (halaman ekonomi dan bisnis 4)	Rabu, 7 April 2021	Proyek Jalan dan Air Bersih Awali Pembangunan Ibu Kota Baru	Bappenas memastikan proyek jalan akses dan saluran air bersih sudah berjalan pada momen peletakan batu pertama yang ditargetkan berlangsung tahun ini.
----	---	--------------------	--	--

Judul	Proyek Jalan dan Air Bersih Awali Pembangunan Ibu Kota Baru
Media	Koran Tempo (halaman ekonomi dan bisnis 4)
Tanggal	7 April 2020
Resume	Bappenas memastikan proyek jalan akses dan saluran air bersih sudah berjalan pada momen peletakan batu pertama yang ditargetkan berlangsung tahun ini.

EKONOMI DAN BISNIS

Proyek Jalan dan Air Bersih Awali Pembangunan Ibu Kota Baru

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan proyek jalan akses dan saluran air bersih sudah berjalan pada momen peletakan batu pertama atau *groundbreaking* ibu kota baru di Kalimantan Timur, yang ditargetkan berlangsung tahun ini.

EDISI 7 APRIL 2021

YOHANES PASKALIS



JAKARTA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan proyek jalan akses dan saluran air bersih sudah berjalan pada momen peletakan batu pertama atau *groundbreaking* ibu kota baru di Kalimantan Timur, yang ditargetkan berlangsung tahun ini.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, mengatakan pengembangan infrastruktur penunjang itu menjadi titik mula kawasan inti ibu kota negara (IKN) seluas 5.644 hektare. “Target *groundbreaking* diharapkan tahun ini, tapi semua tergantung penyelesaian regulasi pendukungnya,” kata dia kepada *Tempo*, kemarin.

Setelah mengantongi rencana induk yang disusun Bappenas, pengembangan IKN dilanjutkan oleh sejumlah kelompok kerja (pokja) yang berisi gabungan perwakilan kementerian dan lembaga. Rudy mengatakan pokja IKN menangani isu infrastruktur, pembiayaan, lingkungan hidup, aparat sipil, pertahanan, sosial-budaya, serta tata ruang dan pertanian.

Pokja infrastruktur yang beranggotakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kata Rudy, tengah menyiapkan akses dari Kota Balikpapan ke kawasan inti IKN baru. “Sudah pasti proyek jalan menjadi yang pertama karena untuk distribusi logistik pembangunan berikutnya,” kata dia.

Pada September 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengembangkan Jembatan Pulau Balang sepanjang 850 meter yang menghubungkan Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, salah satu area yang termasuk lingkaran inti IKN. Proyek senilai Rp 1,3 triliun yang menjadi opsi jalur pengganti kapal feri ini saat itu tercatat sudah rampung hingga 86 persen. Jembatan ini merupakan satu dari tiga proyek strategis untuk ibu kota baru yang diusulkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada pemerintah pusat.



Baca Juga

- Jokowi Segera Kocok Ulang Lembaga Riset Pemerintah - Cover Story
- Jokowi dan Tarik-Ulur Penggabungan Badan Riset - Berita Utama
- Tak perlu dokter! Obat pemulihan penglihatan ditemukan!
- Editorial: Hentikan Proyek Mercusuar Ibu Kota Baru - Editorial
- THR: Hak Pekerja, Kewajiban Perusahaan - Ekonomi dan Bisnis
- Berselisik Skema Pembayaran THR - Ekonomi dan Bisnis

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoljono dalam pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air baku kawasan rencana ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, 6 Desember 2019. Bina Komunikasi Publik PUPR

Rudy mengatakan pemerintah sedang memperkuat kapasitas Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara sebagai sumber air baku. Awalnya, tanggul berdaya tampung hampir 11 juta meter kubik atau setara arus air 2.000 liter per detik itu hanya untuk kebutuhan penduduk Balikpapan. Namun fungsinya ditargetkan melebar ke kawasan IKN. “Kalimantan dipilih sebagai IKN karena memiliki sejumlah *resource* yang bisa dikembangkan,” ujar Rudy.

Bendungan tersebut merupakan satu dari beberapa penunjang air bersih ibu kota baru yang sudah teridentifikasi. Sumber air lainnya adalah Bendungan Batu Lepek di Kutai Kertanegara serta hulu Sungai Mahakam. Namun, hingga berita ini ditulis, sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR belum memberikan jawaban atas pertanyaan *Tempo*.

Proyek pemindahan ibu kota negara yang sudah didengungkan sebelum era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sempat tertunda karena pemerintah memprioritaskan anggaran untuk menambal biaya penanganan pandemi Covid-19. Penyusunan regulasi IKN yang awalnya ditargetkan terbit pada Juli 2020, dilanjutkan dengan *groundbreaking* sebulan setelahnya, tak terwujud.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan pembangunan istana kepresidenan di Kalimantan Timur bisa mulai dikerjakan tahun ini. Meski diklarifikasi masih merupakan konsep awal, desainnya sempat beredar di media sosial.

“Kami optimistis mudah-mudahan istana presiden bisa *groundbreaking* tahun ini. Tanggal 17 Agustus 2024, presiden bisa melaksanakan upacara kemerdekaan di ibu kota baru,” kata Suharso dalam rapat kerja di Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat pada 17 Maret lalu.

Dalam rancangan yang dipublikasikan Bappenas, IKN baru akan diperluas menjadi 56 ribu hektare bila kawasan intinya sudah selesai. Pada tahap akhir, ibu kota baru ini akan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung di area seluas 256 hektare.

Peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Rizal Taufikurrahman, menilai proyek IKN seharusnya belum menjadi prioritas di tengah proses pemulihan ekonomi. “Perlu ada pertimbangan soal dampak proyek ini terhadap percepatan perbaikan ekonomi, tak hanya di Kalimantan, tapi juga secara nasional,” ujarnya.

Dia mengatakan, pada tahap awal, IKN akan mendongkrak kinerja industri besi dan baja serta bisnis kontraktor untuk pembangunan hunian pekerja, baik sementara maupun permanen. Ada juga efek domino ke sektor makanan dan minuman, perdagangan, serta sektor transportasi. Namun, menurut dia, kondisi itu berlaku di masa normal atau sebelum masa pandemi. “Di tengah pandemi, pembentukan nilai tambah dari ibu kota baru ini masih sulit,” kata dia.